

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyangkut pengakuan pendapatan menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan sewaktu mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Penelitian terdahulu diangkat beberapa untuk dijadikan sebagai referensi kajian penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marjono	2017	Analisis Akuntansi Pendapatan Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak	Pengakuan dan pengukuran pendapatan jasa piutang (bunga) belum menggunakan basis aktual atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dimana CU masih menggunakan basis kas. Pendapatan administrasi piutang (provisi) diakui tidak sesuai dengan SAK-ETAP, dimana CU Khatulistiwa Bakti mengakui pendapatan sekaligus pada saat terjadi dan tidak diamortisasi selama jangka waktu kredit sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP untuk pendapatan tanggungan. Pendapatan denda telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK-ETAP) dimana

				pendapatan denda diakui menggunakan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau pada saat anggota melakukan pembayaran.
2	Kadek Arsani, I Wayan Putra	2013	Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK-ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP DUTA SEJAHTERA	Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan KSP Duta Sejahtera belum sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan, perlakuan akuntansi beban sudah sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan yaitu selisih hasil usaha menurut koperasi lebih rendah daripada selisih hasil usaha menurut perhitungan sesuai SAK ETAP.
3	Yudi Rahman	2016	Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maalwat Tamwil Khairul Amin di Martapura	Perlakuan akuntansi yang diterapkan pada pendapatan dari usaha simpan pin-jam pada Koperasi BMT Khairul Amin di Martapura Kabupaten Banjar adalah berdasarkan <i>cash basis</i> yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hambatan dalam pengakuan pendapatan pada Koperasi BMT Khairul Amin adalah penilaian pengakuan pendapatan. Penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kegiatan utama produksi dan penjualan barang dan jasa telah selesai. Ada empat alternatif yang perlu diperhatikan yaitu selama produksi, pada saat produksi, pada saat penjualan, dan pada saat penagihan kas.
4	Nancy Asmahrani,	2016	Analisis SAK ETAP Tentang Pengakuan	Hasil dari penelitian ini bahwa penyajian pencatatan pendapatan dan beban pada

	R. Anastasia Endang Susilawati dan Abdul Halim		Pendapatan dan Beban pada Koperasi Tombo Ati Muamalah Malang – Jawa Timur	Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim belum sesuai dengan SAK ETAP, dimana pendapatan jasa yang diterima oleh Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim belum dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan non anggota yang nantinya akan mempengaruhi hasil partisipasi bruto terhadap laba atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota. Dengan adanya selisih tersebut makan akan menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan koperasi pada masa yang akan datang.
5	Novi Mustika Sari	2016	Analisis Penyajian Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi Balido	Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Pengakuan pendapatan dan beban sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yaitu pendapatan dan beban diakui dengan basis akrual. Sedangkan terhadap format laporan keuangan perhitungan Hasil Usaha pendapatan dan beban tidak sesuai dengan SAK ETAP dimana pendapatan pada Koperasi Karyawan “Balido” PT. (Persero) Angkasa Pura II Palembang tidak memisahkan antara pendapatan anggotan dan pendapatan non anggota, sedangkan beban pada Koperasi Karyawan “Balido” PT. (Persero) Angkasa Pura II Palembang tidak menyajikan beban perkoperasian yang seharusnya disajikan dalam

				laporan keuangan perhitungan Hasil Usaha.
6	Ria Wahyuni Asri, Mukhtar Sapiri dan Arifuddin Mane	2016	Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23 Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kawan	Pengakuan dan pengukuran pendapatan KPRI Setia Kawan telah sesuai dengan PSAK No. 23 tentang pendapatan karena dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (<i>cash basis</i>). Sedangkan untuk pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar atas kesepakatan bersama.

2.2. Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa akan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*) bunga, dividen royalti dan sewa. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul atas aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Wild, dkk (2005;414) pendapatan adalah arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung.

Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu periode (Ricky,2016:2).

Menurut Sisilia (2013:578) pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Sedangkan Sahira (2013:568) menyatakan bahwa pendapatan merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba. Namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan.

2.2.1 Klasifikasi Pendapatan

Suwardjono (2014;356-357) mengungkapkan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama yang sifatnya menerus dan berlanjut dari waktu ke waktu. Pendapatan operasional diperoleh karena adanya kegiatan yang meliputi proses produksi, pengiriman barang atau penyerahan barang dan melaksanakan jasa.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang dihasilkan diluar dari kegiatan operasi. Pendapatan non operasional diperoleh dari produk yang dihasilkan secara tidak rutin, dan pada umumnya perlu dilakukan pembedaan dalam mengklasifikasi pendapatan non operasional.

2.2.2 Pengukuran Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (2002:23) memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang isinya sebagai berikut:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima, jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut, dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan”.

2.2.3 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan terhadap pendapatan merupakan hal penting dikarenakan pengakuan pendapatan berarti memperoleh nilai-nilai baru harta benda (aset) karena hasil dari transaksi tukar menukar dan kemudian mencatat nilai-nilai baru ini dalam pembukuan. Pendapatan merupakan bagian utama dari penghasilan, oleh karena itu pendapatan akan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan itu dapat diukur dengan andal. (Adha,2015;4)

Menurut Suwardjono (2014;392) terdapat 5 jenis kriteria pengakuan pendapatan, yaitu :

a. Pengakuan pendapatan pada saat kontrak penjualan.

Pengakuan pendapatan dinyatakan pada saat perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak tetapi perusahaan belum memulai memproduksi barang.

b. Pengakuan pendapatan selama proses produksi secara bertahap.

Pengakuan pendapatan selama proses produksi secara bertahap pada umumnya diterapkan pada perusahaan yang dalam pembuatan produknya memerlukan waktu yang cukup lama. Pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap (per perioda akuntansi) sejalan dengan kemajuan proses produksi.

c. Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai.

Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai berarti pendapatan diakui pada saat akhir tahap produksi. Pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif (pertambangan) termasuk pertanian. Kondisi ini memungkinkan untuk menaksir dengan cukup tepat nilai jual yang dapat direalisasi suatu sediaan barang pada suatu waktu tertentu.

d. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan.

Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Kriteria terealisasi telah dipenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif.

e. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul.

Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas (*cash basis*). Berbeda dengan pengakuan pada saat kontrak yang barangnya belum diserahkan, pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya diserahkan/dilaksanakan tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang.

Sedangkan, Sulistiyowati (2010:89) menyatakan ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi.

a. Dasar Kejadian Penting (*Cash Basis*)

Pengakuan pendapatan berdasarkan *cash basis* mengakui suatu proses transaksi sebagai pendapatan apabila sudah ada penerimaan berupa kas. Hal ini berarti pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan dari pelanggan sudah diterima.

b. Dasar akrual (*Accrual Basis*)

Pengakuan pendapatan dengan dasar akrual mengakui pendapatan dapat diakui pada periode berlangsungnya proses produksi, akhir produksi dan pada saat penagihan penjualan. Pengakuan pendapatan dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan walaupun kas belum diterima.

2.3. Kriteria Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No. 23 tahun 2015

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2015:22) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diakui hanya jika

kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam PSAK 23 dalam menentukan saat yang tepat untuk mengakui pendapatan yaitu :

a. Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun,
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

b. Penjualan Jasa

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
2. Kemungkinan besar menjadi ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan
4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

c. Bunga, Royalti dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui dengan dasar berikut ini:

1. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
2. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
3. Bunga diakui menggunakan suku bunga efektif.
4. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan
5. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2.4. Kriteria Pengakuan Pendapatan menurut SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagian besar mengadopsi tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai SAK-Umum seperti halnya dalam pengakuan pendapatan. SAK-ETAP Bab 2 Paragraf 33 menyatakan bahwa entitas harus menyusun laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan pos tersebut. Disisi lain, SAK-ETAP Bab 9 paragraf 3 menyatakan bahwa entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK-ETAP jika dampaknya tidak material, dengan kata lain entitas dapat menentukan metodenya sendiri dalam hal pengakuan pendapatan apabila nilai pendapatan tersebut tidak material.

SAK-ETAP Bab 20 yang membahas khusus menyangkut akuntansi untuk pendapatan, dijabarkan transaksi-transaksi yang dapat menghasilkan pendapatan dan bagaimana pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Berikut ini transaksi-transaksi yang menghasilkan pendapatan beserta rincian bagaimana pengakuan pendapatan dapat dilakukan.

a. Penjualan barang

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak mempertahankan atau menururkan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

b. Pemberian jasa

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
2. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan
4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

c. Kontrak konstruksi

Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan (seringkali dimaksudkan sebagai metode persentase penyelesaian). Estimasi hasil yang andal membutuhkan estimasi tingkat penyelesaian, biaya masa depan dan kolektabilitas tagihan yang andal.

d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen

1. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.
2. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
3. Bunga diakui secara akrual.
4. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan
5. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2.5. Karakteristik Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2.5.1 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.5.2 Tujuan Sosial Koperasi

Drs. Sirius Sitanggang, dkk (2017:8) menyampaikan ada 3 hal yang menjadi tujuan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh koperasi. Adapun 3 tujuan sosial tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan yang terus menerus

Kegiatan Kopdit memposisikan pendidikan kepada para anggota, kepengurusan dan staf karyawan serta kepada masyarakat, umumnya dalam masalah ekonomi sosial dan demokrasi dan saling membantu sebagai prinsip Kopdit. Promosi mengenai sikap hemat dan menggunakan uang secara bijaksana

termasuk pendidikan tentang hak dan kewajiban anggota adalah penting/esensial untuk keduanya, watak sosial dan ekonomi Kopdit dalam melayani anggota.

b. Kerjasama antar koperasi

Dalam menjaga perpaduan filosofinya dan praktek-praktek koperasi, Kopdit secara aktif melakukan kerja sama antar koperasi baik secara horizontal maupun vertikal.

c. Tanggung jawab sosial

Kopdit CU memberikan kepedulian terhadap anggota maupun masyarakat sekitar melalui pendidikan, motivasi, partisipasi dan kegiatan sosial yang merupakan keyakinan dan idealisme para perintis koperasi.

2.5.3 Jenis-jenis Koperasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 menggolongkan koperasi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut.

a. Koperasi Desa

Yang dimaksud dengan Koperasi Desa ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung.
2. Pada dasarnya menjalankan aneka usaha.

b. Koperasi Pertanian

Yang dimaksud dengan Koperasi Pertanian ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, pamarodan buruh tani yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubung dengan usaha pertanian yang bersangkutan..
2. Menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha pertanian yang bersangkutan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil usaha pertanian yang bersangkutan.

c. Koperasi Peternakan

Yang dimaksud dengan Koperasi Peternakan ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubung dengan usaha peternakan yang bersangkutan.
2. Menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya dengan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan sampai pada pembelian atau penjualan bersama ternak atau hasil peternakan.

d. Koperasi Perikanan

Yang dimaksud dengan Koperasi Perikanan ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubung dengan usaha perikanan yang bersangkutan.

2. Menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

e. Koperasi Kerajinan/Industri

Yang dimaksud dengan Koperasi Kerajinan/Industri ialah koperasi yang:

1. Anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha pemilik alat produksi dan buruh kerajinan/industri yang kepentingan serta matapencahariannya langsung berhubungan dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan.
2. Menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan mulai dari produksi sampai pada pembelian/penjualan bersama hasil-hasil usaha kerajinan/industri yang bersangkutan.

f. Koperasi Simpan Pinjam

Yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.
2. Menjalankan usaha khusus dalam lapangan pekreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman serta kepada anggota-anggotanya

untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.

g. Koperasi Konsumsi

Yang dimaksud dengan Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang :

1. Anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan yang langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota-anggotanya.

2.5.4 Kebijakan Akuntansi Koperasi

Drs. Sirius Sitanggang, dkk (2017:13) menyatakan bahwa kebijakan akuntansi Kopdit CU dibuat berdasarkan sumber-sumber persyaratan, panduan SAK-ETAP, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Kopdit CU memilih untuk menerapkan SAK ETAP dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP mampu mencerminkan substansi ekonomi dan kegiatan operasi usaha Kopdit CU serta pertimbangan lain adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan lebih efisien bagi Kopdit CU.

2.6. Kerangka Berpikir

CU. Tunas Mekar adalah koperasi simpan pinjam yang memperoleh pendapatan melalui hasil kegiatan usahanya. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Pada

koperasi simpan pinjam, SAK-ETAP dapat dijadikan acuan dalam pengakuan pendapatan yang tepat.

Gambar 2.6
Kerangka Berpikir

